



Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam

Ethics of Government Management from Islamic Law Perspective

Ilham Ramadhan^{*a}, Nurul Hadist^a, Kurniati^a

^aUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* Correspondence: 10200122017@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Government ethics in Islam provides a strong moral foundation for the administration of a modern state. This research examines the ethical principles of Islamic government and their relevance in modern times. Through qualitative analysis of the Al-Quran, Hadith, and related literature, this research identifies three main pillars: honesty as a manifestation of trust, integrity in acting, and deliberation as a decision-making mechanism. The results show that applying these principles can increase transparency, accountability and public participation in government. Although there are challenges such as westernization and corruption, technological advances and democratization open new opportunities to make this happen. This research contributes to understanding the influence of Islamic values on ethical and effective governance practices, while providing valuable information to policy makers, practitioners and academics about building good and sustainable governance.

Keywords: Ethics, Government, Islam

Abstrak

Etika pemerintahan dalam Islam memberikan landasan moral yang kuat bagi penyelenggaraan negara modern. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip etika pemerintahan Islam dan relevansinya di zaman modern. Melalui analisis kualitatif terhadap Al-Quran, Hadits, dan literatur terkait, penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar utama: kejujuran sebagai manifestasi amanah, integritas dalam bertindak, dan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meskipun terdapat tantangan seperti westernisasi dan korupsi, kemajuan teknologi dan demokratisasi membuka peluang baru untuk mewujudkannya. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami pengaruh nilai-nilai Islam terhadap praktik tata kelola yang etis dan efektif, sekaligus memberikan informasi berharga kepada pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi tentang membangun tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Etika, Pemerintahan, Islam

I. Pendahuluan

Struktur politik yang paling krusial dalam pengelolaan sebuah negara adalah pemerintah.¹ Pengelolaan pemerintahan yang baik dan beretika merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan panduan dan prinsip-prinsip yang komprehensif untuk membangun sistem pemerintahan yang bermartabat dan sejalan dengan nilai-nilai moral. Tujuan dari Negara dan Pemerintahan dalam Islam adalah menciptakan keadilan, dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Islam juga bertanggung jawab untuk mengadili setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam.² Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar etika pemerintahan dalam Islam, di mana pemerintah dianggap sebagai pemegang amanah dari rakyat. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan bukan hak pribadi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil dan bijaksana.

¹ Marlen Novita Makalew, Sarah Sambiran, and Welly Waworundeng, 'Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado', *Jurnal Governance*, 1.1 (2021), 1-9.

² Saepul Rizal and Agung Nurrahman, 'Government in Islam', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11.2 (2021), 231-39.

Dalam literatur terdahulu, banyak penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi konsep etika dalam pemerintahan dari berbagai perspektif, termasuk filosofis, hukum, dan sosial. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji etika pemerintahan dari sudut pandang ajaran Islam masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada prinsip-prinsip umum atau aspek tertentu dari etika pemerintahan dalam Islam, seperti konsep amanah (kepercayaan), adil, atau transparansi.

Penelitian dari studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa ajaran Islam menyediakan kerangka kerja yang holistik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, dengan menekankan pada nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Namun, keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya adalah kurangnya eksplorasi secara mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam konteks pengelolaan pemerintahan modern.

Penelitian ini berupaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif tentang etika dalam pengelolaan pemerintahan menurut ajaran Islam. Dengan mengkaji sumber-sumber utama ajaran Islam, seperti Al-Quran dan Hadits, penelitian ini akan mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang relevan dan mengkaji bagaimana cara agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam aspek pengelolaan pemerintahan.

Manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika dalam pengelolaan pemerintahan dari perspektif Islam, serta memberikan panduan praktis bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas mereka secara etis dan bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam bidang tata kelola pemerintahan yang beretika dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

II. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis etika dalam pengelolaan pemerintahan menurut ajaran Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang yang luas untuk mengeksplorasi kompleksitas nilai, norma, dan prinsip yang mendasari praktik pemerintahan dalam konteks keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait bagaimana etika Islam tercermin dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta bagaimana hal ini memengaruhi masyarakat dan sistem pemerintahan secara keseluruhan.

III. Pembahasan

Pentingnya Etika Dalam Pemerintahan

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* artinya adat dan kebiasaan.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tugas dan hak. Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip dan nilai moral, atau sebagai nilai benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau Masyarakat.⁴ Etika, sebagai cabang filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan baik atau buruk, menggunakan akal pikiran sebagai ukuran untuk menilai hal tersebut. Dr. H. Hamzah Yakub berpendapat bahwa etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.⁵ Definisi etika Dr. H. Hamzah Yakub menekankan pentingnya tindakan manusia untuk menentukan apa yang dianggap baik atau buruk. Hal ini sesuai dengan prinsip etika pemerintahan menurut ajaran Islam, dimana keputusan pemerintah harus didasarkan pada penilaian moral yang mendalam dan pemahaman rasional atas konsekuensi tindakan.

Etika memegang peranan penting dalam pemerintahan. Dengan menerapkan etika, pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Para aparatur pemerintahan, termasuk politisi, memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam

³ Intan, "Etika Politik Dan Kepemimpinan."

⁴ Wiharto, "Etika."

⁵ Intan, "Etika Politik Dan Kepemimpinan."

menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kejujuran, kebenaran, dan keadilan dapat diwujudkan.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷ Dengan demikian, penyelenggara negara memegang peran yang sangat krusial. Maka penerapan etika dalam pengelolaan pemerintahan menurut ajaran Islam memiliki implikasi yang signifikan dalam membentuk tatanan sosial yang adil, berkeadilan, dan berkeberpihakan kepada kepentingan umum. Selain itu, penerapan etika Islam dalam pemerintahan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan) dan syura (musyawarah) mengajarkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan Keputusan, dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, pemerintah dapat memperkuat legitimasinya dan membangun kepercayaan yang kuat dari rakyatnya.

Selain memberikan manfaat praktis dalam pengelolaan pemerintahan, penerapan etika Islam juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam membangun masyarakat yang beretika. Dengan mencontohkan prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan musyawarah, pemerintah dapat menjadi agen perubahan yang mempengaruhi budaya dan norma-nilai yang berlaku di masyarakat secara positif.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengakui peran krusial etika dalam pengelolaan pemerintahan menurut ajaran Islam. Dengan memahami pentingnya etika dalam membentuk keputusan dan tindakan pemerintah, kita dapat menggali potensi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Prinsip-Prinsip Etika Politik Dalam Islam

Berikut prinsip-prinsip etika politik dalam Islam:

1. **Kejujuran** menjadi prinsip etika yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan menurut ajaran Islam. Hal ini dikarenakan dalam Islam, kekuasaan pemerintahan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kejujuran adalah terjemahan dari kata *shidq* yang berarti benar dan dapat dipercaya. Dalam istilah lain, kejujuran adalah keselarasan antara perbuatan dan perkataan dengan kebenaran.⁸ Dalam Islam, kejujuran merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap penting dalam agama. Allah SWT menyatakan dalam Al Qur'an : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-Anfal: 27).⁹ Seorang pemimpin pemerintahan memikul tanggung jawab besar untuk mengurus kepentingan rakyat dengan adil dan jujur. Sikap jujur merupakan wujud dari menunaikan amanah tersebut. Jika orang jujur diberi amanah berupa harta, hak atau rahasia, jika di kemudian hari ia melakukan kesalahan maka kejujurannya dapat menyelamatkannya.¹⁰

Pengimplementasian kejujuran bisa dengan cara seorang pemimpin yang jujur dalam menegakkan hukum. karna Kejujuran dalam menegakkan hukum adalah landasan penting untuk memastikan keadilan dan integritas sistem hukum di negara kita. Contohnya Hoegeng Imam Santoso, Kapolri ke-5 Indonesia, salah satu fakta beliau mempunyai sikap kejujuran dalam menegakkan hukum.Saat Hoegeng dirayu oleh seorang penguasa cantik keturunan Makassar-Tionghoa dalam kasus penyelundupan, perempuan tersebut meminta Hagen untuk tidak membawa kasus tersebut ke pengadilan, namun pada

⁶NURDIN, “Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan.”

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.”

⁸ Husaini, *PEMBELAJARAN MATERI PENDIDIKAN AKHLAK*.

⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁰ Madani, “Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw.”

saat itu Hoegeng menolak.¹¹ Kejujuran Hoegeng dalam menegakkan hukum merupakan contoh yang patut diteladani oleh semua orang, terutama bagi para pemimpin dan pejabat publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kejujuran dan integritas, kita dapat menciptakan atau membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Selain itu, kejujuran merupakan pondasi utama untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat akan percaya dan patuh pada pemerintahan yang bersikap transparan, terbuka, dan jujur dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Oleh karena itu, kejujuran menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan, sebab tanpa kejujuran, keadilan akan sulit ditegakkan.

2. **Integritas** dapat di katakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.¹² Dalam Islam, integritas merupakan cerminan dari ketakwaan dan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Al-Quran menyuruh umat Islam untuk selalu berkata benar dan konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Rasulullah SAW juga dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi, sehingga beliau mendapat julukan *al-amin* (yang terpercaya). Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pada akhirnya ditanya bagaimana cara memimpin, apakah tindakannya sesuai dengan perkataan, perasaan, pikirannya, bahkan sesuai dengan ilmunya. Kesenambungan ini disebut integritas intelektual.

Dalam Islam, integritas intelektual adalah kualitas karakter yang sempurna. Menjaga tanda ini adalah tugas yang tak terbantahkan.¹³ Dengan menegakkan integritas intelektual, pemerintah tidak hanya menjalankan amanah dengan benar, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam ajaran Islam. Pentingnya integritas ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw “diceritakann dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah berkata, sangguplah kalian kepada ku atas enam hal, maka aku akan menyanggupi kalian atas surga, yakni jujurilah ketika kalian berucap, penuhilah janji jika kalian membuat janji, sampaikanlah amanah jika kalian diamanahi, jagalah kehormatan kalian, jagalah pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian”.¹⁴ Hadis ini menerangkan bahwa sifat-sifat seperti ketepatan dalam memenuhi janji adalah elemen-elemen kunci dalam etika pengelolaan pemerintah yang baik.

Untuk mengimplementasikan integritas dalam pengelolaan pemerintahan, terdapat beberapa langkah dan upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Membangun kesadaran dan komitmen moral yang kuat, dengan cara Memberikan program pelatihan komprehensif mengenai etika Islam dan prinsip-prinsip integritas, untuk menanamkan pedoman moral yang kuat di kalangan pejabat pemerintah.
- 2) Menegakkan aturan dan perundang-undangan secara konsisten, dengan cara Menegakkan hukuman secara tegas atas pelanggaran. Menegakkan hukuman secara konsisten terhadap pelanggaran etika dapat memberikan pesan pencegahan yang kuat dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- 3) Memberikan teladan dan contoh yang baik, dengan cara Pemimpin pemerintahan harus menunjukkan perilaku etis yang patut dicontoh dan menghindari tindakan apa pun yang dapat membahayakan integritas mereka atau merusak kepercayaan masyarakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan integritas dapat benar-benar diimplementasikan dalam pengelolaan pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta tata kelola yang baik. Dengan demikian, integritas juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang karena pejabat yang berintegritas akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki dengan bertanggung jawab dan untuk kepentingan rakyat. Pada akhirnya, integritas menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata

¹¹ Hidayati et al., “Jendral Hoegeng Imam Santoso: Kapolri Jujur, Disiplin Dan Sederhana Sebagai Teladan Generasi Muda Jendral Hoegeng Imam Santoso: Kapolri Honest, Discipline and Simple Examples of Young Generation.”

¹² Anisa Widya Pangestika, “Implementasi Penanaman Nilai Integritas Pada Peserta Didik Melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter (Ppk) Di Sd Negeri 1 Sokanegara.”

¹³ Mahfudzi Mahfudzi.

¹⁴ Ummah, “Sifat Yang Harus Dimiliki Agar Menjadi Manusia Yang Berintegritas.”

kelola pemerintahan yang baik *good governance*, yang menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.

3. **Musyawah** menjadi prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan menurut ajaran Islam. Hal ini dikarenakan musyawarah merupakan perintah langsung dari Allah SWT dalam Al-Quran dan merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya. Musyawarah adalah kemauan dan kemampuan untuk mendengar serta menyampaikan pendapat. Diperlukan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam proses ini.¹⁵ Perintah Al-Quran secara eksplisit memerintahkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 159: "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..."¹⁶ Ayat tersebut menegaskan bahwa musyawarah adalah cara yang diperintahkan Allah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan.

Pada masa kini (dalam konteks bernegara), musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu tempat dan waktu. Implimentasi musyawarah termasuk wilayah Ijtihad manusia. Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka itulah yang digunakan. Karena baik Al-Qur'an maupun Hadist sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung hikmah yang besar bagi umat manusia, karena musyawarah itu sendiri sebagai suatu prinsip konstitusional yang digariskan melalui Al-Qur'an dan di teladani melalui tradisi Nabi tidak berubah.¹⁷ Namun implimentasi dan pelaksanaannya selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan ruh Al-Qur'an dan tradisi nabi.

Contohnya Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sebelum sebuah RUU disahkan menjadi Undang-Undang, terlebih dahulu dilakukan pembahasan secara mendalam di tingkat komisi terkait dan rapat paripurna DPR/DPD. Dalam pembahasan tersebut, setiap fraksi dari partai politik yang ada di DPR/DPD dapat menyampaikan pandangan, usulan, maupun kritiknya terhadap RUU tersebut. Musyawarah dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat sehingga diperoleh keputusan akhir yang disetujui bersama. Contoh konkretnya pembahasan RUU Cipta Kerja yang cukup alot dan memicu perdebatan panjang di DPR pada tahun 2020 lalu. Berbagai fraksi menyampaikan pandangan yang berbeda-beda terkait substansi RUU tersebut sebelum akhirnya disepakati bersama melalui musyawarah.

Banyak manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan musyawarah. Musyawarah dapat menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.¹⁸ Dengan menerapkan prinsip musyawarah, pengelolaan pemerintahan akan menjadi lebih demokratis, melindungi hak-hak rakyat, mencegah kesewenang-wenangan, serta mempersatukan berbagai pandangan demi terciptanya kebaikan bersama sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Tantangan Dan Peluang Dalam Menerapkan Etika Pemerintahan Islam di Era Modern.

Tantangan dalam menerapkan etika pemerintahan islam di era modern meliputi beberapa aspek:

1. Westernisasi: Dimana model kehidupan manusia semakin bergerak ke arah modernisme dengan penekanan pada sistem budaya Barat.¹⁹ Westernisasi telah membawa perkembangan teknologi dan media yang mempengaruhi budaya Islam. Penggunaan internet, media sosial, dan televisi Barat mempermudah akses terhadap informasi dan hiburan global. Hal ini dapat mengubah persepsi dan pemahaman

¹⁵ Hamzah, Jumini, and Maulida, "Musyawarah Dalam Perspektif Asas Black."

¹⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁷ Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam."

¹⁸ Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)."

¹⁹ Prayogo et al., "El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam Implementasi Nilai Islamisasi Ilmu Dalam Membendung Arus Westernisasi El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam Vol . 4 No . 2 Desember Tahun 2023 206-223."

masyarakat Muslim terhadap agama, tradisi, dan norma sosial mereka. Akibatnya, muncul dilema dan kesulitan dalam penerapan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan di rumah dan keteladanan dari orang tua.

2. Korupsi dan ketidakadilan: Korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan masih marak terjadi di banyak negara Muslim. Korupsi tidak hanya merugikan beberapa individu, tetapi juga telah menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan serta kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.²⁰ Hal tersebut merupakan hambatan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan bermoral. Berikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak terjadi masalah-masalah tersebut.

3. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran: Banyak pemimpin dan masyarakat Muslim belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang etika pemerintahan Islam. Hal ini dapat menyebabkan penerapan yang tidak konsisten dan tidak efektif. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam pemerintahan Islami.

Peluang dalam menerapkan etika pemerintahan Islam di era modern:

1. Perkembangan Teknologi: Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan tentang etika pemerintahan Islam dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

2. Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional antara negara-negara Muslim dan organisasi Islam dapat membantu dalam mengatasi tantangan bersama dan dalam mempromosikan etika pemerintahan Islam di tingkat global.

3. Munculnya Pemimpin Muslim yang Visioner: Munculnya pemimpin Muslim yang visioner dan berkomitmen pada penerapan etika Islam dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan mendorong perubahan positif.

4. Demokratisasi: Demokratisasi memungkinkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, yang sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan.²¹ Proses demokratisasi di suatu negara dapat membuka peluang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam.

IV. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika pengelolaan pemerintah menurut ajaran Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, integritas dan kebijaksanaan. Kejujuran merupakan landasan terpenting dalam menjalankan misi kepemimpinan, Integritas dapat membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan musyawarah mendorong pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meskipun ada tantangan kontemporer seperti westernisasi dan korupsi, kemajuan teknologi, kerja sama internasional, dan demokratisasi membuka peluang besar untuk menerapkan etika pemerintahan Islam dengan lebih efektif. Dengan demikian, etika pemerintahan Islam memberikan kerangka komprehensif untuk membangun sistem pemerintahan yang adil, terbuka dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

²⁰ Fazzan, "KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM."

²¹ Martina et al., "Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam."

Daftar Pustaka

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 242-53. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509.
- Anisa Widya Pangestika. "Implementasi Penanaman Nilai Integritas Pada Peserta Didik Melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter (Ppk) Di Sd Negeri 1 Sokanegara," 2018, 12-18. [https://repository.ump.ac.id/10706/1/Anisa Widya Pangestika_Cover. pdf](https://repository.ump.ac.id/10706/1/Anisa%20Widya%20Pangestika_Cover.pdf).
- Fazzan. "Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam." *Demographic Research* 1, no. 1 (2020): 95-108. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11529><https://www.neliti.com/publications/332411/kolusi-dan-nepotisme-dalam-perspektif-al-quran-studi-pendekatan-tafsir-tematik><https://batukota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTc4MD>.
- Hamzah, Mukhotob, Sri Jumini, and Ana Maulida. "Musyawarah Dalam Perspektif Asas Black." *SPEKTRA : Jurnal Kajian Pendidikan Sains* 2, no. 2 (2016): 146.
- Hidayati, Nur, Anny Wahyuni, Budi Purnomo, Pendidikan Sejarah, and Universitas Jambi. "Jendral Hoegeng Imam Santoso: Kapolri Jujur, Disiplin Dan Sederhana Sebagai Teladan Generasi Muda Jendral Hoegeng Imam Santoso: Kapolri Honest, Discipline and Simple Examples of Young Generation." *Jurnal Swadesi* II, no. 1 (2021): 34.
- Husaini. *pembelajaran materi pendidikan akhlak*. Edisi Pert. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2016.
- Intan, Rianto. "Etika Politik Dan Kepemimpinan." *Bab I* 2019 (2020): 1-16.
- Madani, Hanipatudiniah. "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 145-56. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14346>.
- Mahfudzi Mahfudzi. "Integritas Intelektual Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Al-Fanar* 2, no. 1 (2019): 15-28. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n1.15-28>.
- Makalew, Marlen Novita, Sarah Sambiran, and Welly Waworundeng. "Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado." *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34304>.
- Martina, Martina, Fitri Sarinda, Dwi Noviani, and Hilmin Hilmin. "Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (2023): 153-66.
- Nurdin, M S Ismail. "Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan," 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, no. 1 (1999): 1-5.
- Prayogo, Tonny Ilham, Dianah Nabila, Silmi Rahma Pertiwi, and Dzihni Durratun Nikmah. "El-Fikr : Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam Implementasi Nilai Islamisasi Ilmu Dalam Membendung Arus Westernisasi El-Fikr : Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam Vol . 4 No . 2 Desember Tahun 2023 206-223" 4, no. 2 (2023): 206-24.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.
- Rizal, Saepul, and Agung Nurrahman. "Government in Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, no. 2 (2021): 231-39. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2200>.
- Syarkawi. "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam." *Lentera* 12 (2013): 87-90.

Ummah, Shofiyatul. "Sifat Yang Harus Dimiliki Agar Menjadi Manusia Yang Berintegritas." Bincangsyariah, 2021. <https://bincangsyariah.com/kolom/sifat-yang-harus-dimiliki-agar-menjadi-manusia-yang-berintegritas/>.

Wiharto, Mulyo. "Etika." *Forum Ilmiah Indonusa* 4, no. 3 (2014): 197-98.